PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, PENGALAMAN AUDITOR, DAN KEANDALAN BUKTI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT

(Studi Empiris pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Oleh :

SRI WAHYUNI
2007/84417

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2012

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, PENGALAMAN AUDITOR, DAN KEANDALAN BUKTI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi Empiris pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau)

Nama	**: Sri Wahyuni**
NIM/BP	**: 84417/2007**
Program Studi	**: Akuntansi**
Keahlian	**: Akuntansi Sektor Publik**
Fakultas	**: Ekonomi**

Padang, April 2012

Disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	**Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak**
NIP.19580519 199001 1 001	**NIP. 19801019 200604 2 002**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi – Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, PENGALAMAN AUDITOR, DAN KEANDALAN BUKTI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi Empiris pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau)

Nama	**: Sri Wahyuni**
NIM/BP	**: 84417/2007**
Program Studi	**: Akuntansi**
Keahlian	**: Akuntansi Sektor Publik**
Fakultas	**: Ekonomi**

Padang, April 2012

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	
2.	Sekretaris	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
3.	Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	
4.	Anggota	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	

ABSTRAK

SRI WAHYUNI, 2007/84417 : PengaruhIndependensi Auditor, Pengalaman Auditor dan Keandalan Bukti Audit terhadapKualitas Audit *(Studi EmpirisBPK-RI Perwakilan Provinsi Riau)*.Skripsi. Fakultas Ekonomi.UniversitasNegeri Padang, 2012.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
Pembimbing II :Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak

Penelitianini bertujuanuntukmenguji: (1) Pengaruhindependensi auditor terhadapkualitas audit, (2) Pengaruh pengalaman auditorterhadapkualitas audit, (3) Pengaruhkeandalan bukti audit terhadapkualitas audit.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif.Populasidalampenelitianiniadalah auditor yang bekerjapadaBPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.Penelitianinimenggunakan total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda danuji t untuk melihat pengaruh secara parsial serta uji F untuk uji model dimana F hitung > F tabel yaitu sebesar 36,665> 2,89 atau (0,05>Sig.0,000). Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0*for windows*.

Temuan penelitian menunjukkan:(1)Independensiauditor berpengaruhsignifikanpositifterhadapkualitas audit,dimanat_{hitung}>t_{tabel}yaitusebesar2,121>1,6924 atau(0,05>Sig.0,041) dan β bernilai 0,212 dengan arah positif,(2)Pengalamanauditor berpengaruhsignifikanpositifterhadapkualitas audit,dimanat_{hitung}>t_{tabel}yaitusebesar3,486> 1,6924 atau (0,05>Sig.0,000) dan β bernilai 0,373 dengan arah positif,(3)Keandalan bukti auditberpengaruhsignifikanpositifterhadapkualitas audit,dimanat_{hitung}>t_{tabel}yaitusebesar2,688> 1,6924 atau (0,05>Sig.0,031) β bernilai 0,250 dengan arah positif.

Berdasarkanhasilpenelitiantersebut, makadisarankankepada auditor agar dapat menjaga kualitas auditnya.Auditor sebaiknyaselalumenjagadan meningkatkan independensinyaselamamenjalankan proses auditdenganmengkomunikasikanhasil audit danmelakukan audit keputusansesuaidengankeadaanataufakta yang terjadi. Dan auditor jugaharusmemiliki pengalamandalammelakukan audit agar dapat meminimalisir risiko audit. Dalam pengumpulanbukit audit yang andal auditor juga sebaiknya meningkatkan perhatiannya pada ukuran dan karakteristik sampel yang dipilih.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PengaruhIndependensi Auditor, Pengalaman Auditor, dan Keandalan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit". Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Akselaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak/Ibu auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua (Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Jusniati) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mancapai apa yang dicita-citakan.
6. Kakak-kakak (Yeni Elfira, SS, dan Ari Novita, SE) serta kakak sepupu (Abdi Azazi, SE) yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan dan adik-adikku (Ulfa Yanti, Nisa Amalia, dan Asyifa) yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007, terima kasih atas dukungan moril dan materil kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
BAB II. TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 12
A. Kajian Teori 12
1. Kualitas Audit 12
2. Independensi Auditor 18
3. Pengalaman Auditor 25
4. Keandalan Bukti Audit 29
B. Penelitian Relevan 37
C. Kerangka Konseptual 39
D. Hipotesis 41
BAB III. METODE PENELITIAN 42
A. Jenis Penelitian 42
B. Populasi dan Sampel 42
C. Jenis Dan Sumber Data 42
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Variabel Penelitian 43
F. Instrumen Penelitian 44
G. Uji Validitas dan Reabilitas 46

H. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 47
I. Uji Asumsi Klasik 49
J. Teknik Analisis Data 51
K. Definisi Operasional 55
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 57
B. Demografi Responden 58
C. Uji Validitas dan Reliabilitas pada Data Penelitian 61
D. Deskripsi Hasil Penelitian 65
E. Uji Asumsi Klasik 72
F. Analisis Data 75
G. Pembahasan 79
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 86
A. Kesimpulan 86
B. KeterbatasanPenelitian 86
C. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Skala Pengukuran 44
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 45
3. *Corrected item-Total Correlation*Instrumen Penelitian 48
4. Nilai *Cronbach's Alpha* Instrumen Penelitian..... 49
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner..... 58
6. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 59
7. Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal..... 59
8. Responden Berdasarkan Lama PengalamanKerja Dibidang Audit 60
9. Responden Berdasarkan Banyak Penugasan Audit yangPernahDitangani..... 61
10. Nilai *Corrected item-Total Correlation* Kualitas Audit (Y)..... 62
11. Nilai *Corrected item-Total Correlation* Independensi Auditor (X1) 62
12. Nilai *Corrected item-Total Correlation* Pengalaman Auditor (X2) 63
13. Nilai *Corrected item-Total Correlation* Keandalan Bukti Audit (X3)..... 63
14. UjiReliabilitas Data 64
15. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Audit 66
16. Distribusi Frekuensi Variabel IndependensiAuditor..... 68
17. Distribusi Frekuensi Variabel PengalamanAuditor..... 69
18. Distribusi Frekuensi Variabel Keandalan Bukti Audit..... 71
19. Uji Normalitas Residual 73
20. Uji Multikolinearitas..... 74
21. Uji Heterokedastisitas..... 75

22. Uji F Model 76
23. Adjusted R Square 76
24. Koefisien Regresi Berganda 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Konseptual Penelitian.....40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Kuesioner Penelitian 90
2. Tabulasi *Pilot Test* 95
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas*Pilot Test* 99
4. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian..... 105
5. Uji Asumsi Klasik..... 111
6. Uji Model 113
7. Uji Hipotesis 114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas pada entitas publik terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia semakin meningkat karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan pemerintah (*bad governance*) dan buruknya birokrasi. Akuntabilitas publik merupakan bagian penting dari sistem politik dan demokrasi, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dalam rangka pengelolaan keuangan lembaga-lembaga publik, seperti pemerintah pusat dan daerah harus memberikan penjelasan kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas atas aktivitas yang dilakukan sebagai konsekuensi dari amanat yang diembannya.

Seiring dengan itu, dalam rangka agar entitas publik mempertahankan kualitas, profesionalisme, serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya dan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban oleh entitas publik, maka dibutuhkanlah suatu pemeriksaan. Hal ini juga seiring dengan pendapat Mardiasmo (2005) bahwa salah satu aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemeriksaan (audit).

Defenisi auditing menurut *American Accounting Association* (AAA) dalam Guy, Alderman dan Winter (2002) adalah "suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan

pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan." Tindakan atau kejadian ekonomi (informasi) tersebut disusun dalam bentuk laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan dapat dipercaya apabila telah diaudit oleh auditor independen yang memeriksa bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Tanpa dilakukan oleh auditor yang menjaga independensinya, serta berpengalaman dalam mengumpulkan bahan bukti yang handal sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, manajemen organisasi tidak akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang telah disajikan merupakan informasi yang dapat dipercaya. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan yang telah diaudit inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan.

Kualitas audit menurut Watkins, *et al* (2004) dalam Siti (2010:17) adalah kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung pada independensi yang dimiliki auditor. Demikian juga menurut Wilopo (2001) dalam Sari (2009:8) kualitas audit

pemerintah ditentukan oleh kapabilitas teknikal auditor (meliputi: pengalaman, pendidikan, dan profesionalisme) dan independensi auditor. Sedangkan Kode Etik dan Standar Audit (BPKP, 2008) menyatakan bahwa kualitas audit adalah ukuran mutu pekerjaan audit yang harus dicapai oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan dengan mematuhi standar audit yang telah ditetapkan dan menaati kode etik yang mengatur prilaku sesuai dengan tuntutan profesi organisasi dan pengawasan.

Audit yang dilakukan jika tidak berkualitas secara otomatis akan menurunkan kepercayaan pemakai laporan keuangan terhadap auditor, sehingga ketepatan dalam pengambilan keputusan akan sulit terwujud, dan selain itu kualitas audit yang rendah dapat berakibat fatal terhadap entitas yang diaudit. Seperti era globalisasi saat ini, skandal akuntasi yang terungkap melibatkan sejumlah perusahaan terkemuka, seperti Enron, Xerox, Tyco, Global Crossing dan Worldcom (Miharni, 2011). Kasus tersebut melibatkan banyak pihak dan berdampak luas. Enron misalnya, selain pihak internal perusahaan namun juga melibatkkan auditor eksternal, hal ini cukup membuktikan kualitas audit semakin dipertanyakan, sehingga pentinglah seorang auditor maupun lembaga auditnya menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, begitu juga lembaga audit pemerintah Indonesia seperti BPK sebagai pemeriksa independen akan mempengaruhi kualitas jasa yang diberikannya.

BPK menetapkan SPKN sebagai standar audit di lingkungan keuangan pemerintah sesuai Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2004 yang diadopsi dari standar auditing Amerika, yaitu *Generally Accepted Auditing Standards* (standar audit

yang diterima umum) yang merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya sehingga hasil pemeriksaannya lebih berkualitas (BPK-RI, 2007) dalam Shinta (2010). Audit akan berkualitas jika seorang auditor taat terhadap standar audit yang berlaku, sehingga dengan ketaatan dan pemenuhan standar tersebut auditor dapat menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi.

Adapun SPKN ini memuat: 1) standar umum, meliputi: kecakapan profesional yang memadai (kemampuan/keahlian, pengalaman), independensi, penggunaan kemahiran profesional, dan pengendalian mutu, 2) standar pekerjaan lapangan, meliputi: perencanaan audit, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern, dan bukti audit yang cukup dan kompeten, 3) standar pelaporan, berisi tentang: keharusan bagi laporan keuangan yang disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, pengungkapan yang memadai, dan pernyataan pendapat (SPKN, 2007) dalam Rai (2008:50-56).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga mengeluarkan suatu standar profesi yang memuat suatu prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional yaitu Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mengatur tentang norma perilaku hubungan antara akuntan dengan klien, antara akuntan dengan sejawatnya dan masyarakat. Kode Etik tersebut berisikan bagaimana sikap-sikap auditor dalam menjalankan tugasnya. Diantaranya adalah rasa tanggungjawab yang tinggi, memiliki sikap integritas, objektivitas, independensi dan kompetensi.

Independensi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki auditor selain keahlian/kemampuan teknis karena kepercayaan masyarakat terhadap sikap independen auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan. Hal ini sesuai dengan pendapat Taylor (1991) dalam Risse (2005) yang menyatakan bahwa tidak ada standar yang lebih penting dalam kode etik selain independensi.

Independensi berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya dan membuat laporan audit (Arens, *et al*, 2008:124). Independensi merupakan suatu keadaan dimana auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak kepada pihak manapun, auditor hanya mempertimbangkan fakta yang ditemukan untuk memberikan pendapat sesuai hasil temuannya dalam audit yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas informasi serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang akhirnya kulitas audit akan meningkat. Jadi semakin independen seorang auditor maka kualitas audit akan semakin baik. Oleh karena itu, auditor sangat perlu menjaga independensinya agar audit yang dilakukan berkualitas.

Disamping independensi, auditor juga harus memiliki pengalaman dalam memeriksa kelengkapan kertas kerja karena dengan pengalaman yang banyak kemungkinan untuk terjadinya risiko audit akan berkurang. Selain itu auditor juga harus mengumpulkan bukti audit yang andal untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan yang diaudit telah disajikan secara wajar sesuai standar yang ditetapkan.

Pengalaman merupakan atribut yang penting dimiliki oleh auditor, hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak

berpengalaman lebih banyak dari pada auditor yang berpengalaman (Meidawati, 2001) dalam Sari (2009:31). Pengalaman merupakan pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal (Knoers & Haditono, 1999) dalam Shinta (2010). Sebagaimana yang dinyatakan dalam standar umum pertama SPKN dalam Rai (2008:50) bahwa "pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan." Menurut Arens *et al*, (2008:42) kecakapan profesional ini dapat diperoleh dengan pengalaman praktik bagi pekerjaan yang sedang dilakukan (dalam hal ini adalah audit). Jika semakin luas pengalaman kerja auditor, semakin terampil melakukan pekerjaannya dan akan semakin sempurna pola berfikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini akan semakin kecil kemungkinan untuk melakukan kesalahan dalam proses audit, karena menurut Tubs (1992) dalam Risse (2005) menyatakan bahwa auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan secara akurat, dan 3) mencari penyebab kesalahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengalaman merupakan faktor penting dalam penentu kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah keandalan bukti audit sebagaimana terdapat dalam standar SPKN diatas. Menurut Mulyadi (2002:74) bukti audit yaitu segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Pada standar pelaksanaan ketiga menyatakan bahwa "bukti yang cukup, kompeten, dan relevan

harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.” Dasar pemikiran standar ini adalah bahwa pelaksanaan audit pada hakikatnya merupakan pengumpulan dan pengujian atas bukti dan fakta di lapangan, sehingga bukti yang didapat harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Rai, 2008:53).

Bukti audit yang andal harus diperoleh sebagai dasar bagi auditor dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Jika bukti yang andal tidak diperoleh maka kualitas audit yang dihasilkan tidak akan baik karena pendapat yang diberikan pada laporan audit tidak dapat menjadi informasi yang andal bagi para pemakai informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit juga berperan penting dalam peningkatan kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan mengenai independensi auditor, pengalaman auditor, dan keandalan bukti audit di atas, maka penting bagi auditor untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk menjamin kualitas audit yang dilakukan. Namun kenyataan yang ada dilapangan yaitu banyaknya auditor yang mengabaikan faktor-faktor ini dan tidak melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Permasalahan-permasalahan mengenai kualitas audit akhir-akhir ini yang marak terjadi dilingkungan auditor-auditor BPK mengarah kepada penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi pada auditor BPK Bagindo Quirinno ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 13 Februari 2009 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagindo yang menjadi Ketua Tim Audit dari BPK yang bertugas memeriksa Laporan Keuangan Depnakertrans ini juga

menerima Rp 650 juta dari Taswin Zein. Bagindo menerima uang karena mengubah hasil audit proyek pengadaan alat BLK. Proyek dengan dana yang berasal dari ABT DIKS dan ABT DIP Tahun Anggaran 2004 ini seharusnya dinilai oleh Bagindo berindikasi penyalahgunaan anggaran. Tetapi karena uang Rp 650 juta ini maka Bagindo merubah hasil audit BPK untuk proyek ini. Ketua Majelis Hakim Kresna Menon yang menangani kasus ini juga menyatakan pemberian uang pada Bagindo Quirinno, sebagai ketua tim pemeriksa dari BPK untuk proyek tersebut dinilai bertentangan dengan kewenangan. KPK akan menjerat Bagindo dengan pasal 12e, pasal 12a, pasal 5 atau pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 (http://www.google.com)

Dalam permasalahan ini terlihat bahwa auditor BPK tidak menjaga independensinya karena tidak jujur dalam melaporkan hasil audit tersebut dengan merubah atau merekayasa hasil temuannya, akibatnya audit yang dilakukanpun dapat dikatakan tidak berkualitas.

Peneliti terdahulu yang meneliti tentang kualitas audit adalah Nova (2008) yang menguji pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Penelitiannya dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Padang. Penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di KAP Kota Padang, dimana hasil penemuannya di lapangan menunjukkan bahwa auditor menyadari akan pentingnya independensi, sehingga akan selalu mempertahankan independensinya untuk menciptakan kualitas audit yang baik.

Sari (2009) melakukan penelitian mengenai pengalaman auditor dengan menganalisis faktor-faktor penentu kualitas audit yang dirasakan dan kepuasan *auditee* di Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dengan hipotesis, yaitu dalam hipotesisnya, pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain itu penelitian mengenai pengalaman auditor juga dilakukan oleh Shinta (2010). Penelitian Shinta bertujuan untuk menelaah secara empiris pengaruh pengalaman auditor dan kelayakan bukti audit terhadap kualitas audit pemerintah. Shinta melakukan penelitiannya pada BPK-RI Perwakilan Jambi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman auditor dan kelayakan bukti audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah dan berbagai fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kualitas audit, dimana penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu, yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini dilakukan agar auditor melakukan tugas pemeriksaannya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dalam pemerintahan yang dapat memberikan pedoman bagi pemeriksa (auditor) sehingga audit yang dihasilkan dapat berkualitas demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel independen yang diambil yaitu independensi auditor, pengalaman auditor dan keandalan bukti

audit karena berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian oleh peneliti terdahulu, kemudian populasi yang diteliti juga berbeda yaitu auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Riau.

Dari uraian diatas maka penelitian ini diberi judul **"Pengaruh Independensi Auditor, Pengalaman Auditor, dan Keandalan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BPK-RI Perwakilan Riau)."**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permsalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada BPK-RI Perwakilan Riau?
2. Sejauhmana pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada BPK-RI Perwakilan Riau?
3. Sejauhmana pengaruh keandalan bukti audit terhadap kualitas audit pada BPK-RI Perwakilan Riau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada BPK-RI Perwakilan Riau.

2. Pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada BPK-RI Perwakilan Riau.
3. Pengaruh keandalan bukti audit terhadap kualitas audit pada BPK-RI Perwakilan Riau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada auditor khususnya BPK-RI Perwakilan Riau bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.
2. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya dan membantu dalam pengembangan ilmu akademik.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan peneliti tentang sejauhmana pengaruh independensi auditor, pengalaman auditor dan keandalan bukti audit terhadap kualitas audit pada BPK-RI Perwakilan Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kulitas Audit

a. Pengertian Kualitas Audit

Defenisi auditing menurut *American Accounting Association (AAA)* dalam Guy, Alderman dan Winter (2002) adalah "suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Arens, *et al* (2008:4) auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit pada entitas publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan (Rai, 2008:29).

Watkins, *et al* (2004) dalam Siti (2010:17) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada

independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Demikian juga menurut Wilopo (2001) dalam Sari (2009:8) kualitas audit pemerintah ditentukan oleh kapabilitas teknikal auditor (meliputi: pengalaman, pendidikan, dan profesionalisme) dan independensi auditor.

Kualitas audit dipengaruhi oleh elemen-elemen yang ada pada standar audit dan etika profesional auditor, agar audit yang dilakukan berkualitas maka auditor harus mematuhi dan melaksanakan apa yang diwajibkan dalam standar audit dan etika profesinya (SPKN, 2007) dalam Rai (2008:49). Kode Etik dan Standar Audit (BPKP, 2008) menyatakan bahwa kualitas audit adalah ukuran mutu pekerjaan audit yang harus dicapai oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan dengan mematuhi standar audit yang telah ditetapkan dan menaati kode etik yang mengatur prilaku sesuai dengan tuntutan profesi organisasi dan pengawasan.

Guy, Alderman dan Winter (2002:25) menegaskan bahwa Standar Audit yang Berlaku Umum (*Generally Accepted Auditing Standards*) adalah standar otoritatif yang harus dipenuhi oleh auditor pada saat melakukan penugasan audit untuk menjamin kualitas hasil audit. Standar audit untuk entitas/organisasi publik yang berlaku di Indonesia adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dibuat oleh BPK-RI. SPKN dalam Rai (2008:50-56) meliputi:

1) Standar Umum: auditor harus memiliki kecakapan profesional yang memadai (keahlian, pengalaman, pendidikan profesional), independensi dalam sikap dan mental, penggunaan kemahiran profesional, dan pengendalian mutu.

2) Standar Pekerjaan Lapangan: perencanaan audit, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern, bukti audit yang cukup dan kompeten.
3) Standar Pelaporan: keharusan bagi laporan keuangan yang disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, pengungkapan yang memadai, dan pernyataan pendapat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa audit dikatakan berkualitas jika seorang auditor taat terhadap SPKN sehingga dengan ketaatan dan pemenuhan standar tersebut auditor dapat menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi *auditee* sehingga menghasilkan output yang dapat dipercaya dan membantu dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Dengan demikian semua standar tersebut merupakan standar yang menentukan kualitas audit yang dihasilkan auditor.

b. Elemen Pengendalian Mutu Audit

Auditor harus selalu menjaga mutunya sebagai pihak yang independen dan bebas dari pengaruh kepentingan siapapun, karena kualitas hasil audit berkaitan erat dengan mutu auditor. Menurut Rai (2008:74), pengendalian mutu (*quality control*) mengacu pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh manajemen audit individual. Prosedur pengendalian mutu harus dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa semua audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Adapun tujuan dari pengendalian mutu mengacu pada: kompetensi dan

independensi, supervisi dan pemberian tugas kepada personel untuk melaksanakan audit, panduan dan bimbingan, evaluasi atas klien, pembagian tanggung jawab adiministrasi dan teknis (Rai, 2008:74).

Pengendalian mutu membutuhkan pengalaman yang jelas mengenai letak tanggung jawab atas suatu keputusan. Setiap orang yang terlibat dalam audit bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memahami tanggung jawab masing-masing seperti: manajer bertanggung jawab atas manajemen audit sehari-hari, mencakup perancanaan yang rinci, pelaksanaan audit, supervisi atas staf, pelaporan kepada manajemen lembaga audit, dan memantau penyiapan laporan audit.

Selain itu, ada beberapa pendapat dapat dianggap bahwa kualitas audit yang baik itu adalah pelaksanaan audit yang mendasarkan pada pelaksanaan *Value For Money* (VFM) audit yang dilakukan secara independen, keahlian yang memadai, judgment dan pengalaman (Taufiq, 2010:2).

c. Atribut Kualitas Audit

Berikut ini adalah atribut kualitas audit menurut Widagdo et.al dalam Nizarul, dkk (2007):

a. Pengalaman melakukan audit

Pengalaman merupakan atribut penting yang harus dimikili auditor, hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak dari pada auditor yang berpengalaman. Tubs (1992) dalam Risse (2005) mengatakan bahwa auditor yang yang berpengalaman akan memiliki keunggulan dalam

hal: 1) menemukan kesalahan, 2) memahami kesalahan secara akurat dan 3) mencari penyebab kesalahan. Melalui keunggulan tersebut akan bermamfaat bagi klien untuk malakukan perbaikan-perbaikan dan klien akan merasa puas.

b. Memahami industri klien

Auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat bisnis satuan usaha, organisasinya dan karakteristik operasinya. Memahami bisnis klien berarti memperkecil resiko audit sebab memahami industri klien menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dengan profesi, sehingga hasil audit yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu audit (Harry dalam Nova 2008).

c. Responsive atas kebutuhan *Auditee*

Klien berharap menerima lebih banyak dari hanya opini audit klien saja, tetapi klien juga ingin mendapatkan keuntungan dari keahlian dan pengetahuan auditor dibidang usaha dan memberikan nasehat tanpa diminta.

d. Taat pada standar umum

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar audit.

e. Independensi

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, standar profesional akuntan publik (SPAP), sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit.

f. Sikap hati-hati

Auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa professional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuanya. Kesalahan dideteksi jika auditor memiliki keahlian dan kecermatan.

g. Komitmen yang kuat terhadap kualitas audit

Komitmen dapat didefisikan sebagai: 1) Sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan dari nilai-nilai organisasi atau profesi, 2) Sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi atau profesi dan 3) Sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan profesi.

h. Keterlibatan pimpinan kantor akuntan publik

Tanpa adanya keterlibatan pimpinan, manajemen mutu menjadi konsep yang kabur dan hampir mustahil di implementasikan secara efektif. Keberhasilan manajemen mutu memerlukan kepemimpinan yang efektif, baik secara formal maupun yang tidak formal.

i. Standar etika yang tinggi

Audit yang berkualitas tinggi sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggungjawab kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit.

j. Tidak mudah percaya (skeptisme profesional)

Audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional, standar profesional akuntan publik.

k. Melakukan pekerjaan lapangan yang tepat

Standar pekerjaan lapangan mengharuskan bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2. Independensi Auditor

a. Pengertian Independensi Auditor

Menurut Arens, *et al* (2008:124) independensi berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya dan membuat laporan audit.

Menurut Mulyadi (2002:26), independensi adalah:

> "Adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya."

Cristiawan (2002:83) dalam Nova (2008) mendefenisikan independensi yaitu :

> "Suatu keadaan dimana auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak pada pihak manapun, sehingga auditor hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ditemukannya untuk menghasilkan laporan atas audit yang telah dilakukannya."

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tigas standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan objektivitas tugas profesionalnya. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Di lain pihak objektivitas merupakan sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta, kepentingan pribadi tidak terdapat dalam fakta yang dihadapi (Mulyadi, 2002:28).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap yang harus dimiliki auditor pada saat melaksanakan tugasnya secara jujur, tidak memihak, mengemukakan fakta apa adanya berdasarkan bukti yang ada dan pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya untuk menghasilkan laporan audit.

b. Pentingnya Independensi Auditor

Pada pernyataan standar umum kedua dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa :

> "Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya" (Rai, 2008:50).

Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Meskipun seorang akuntan memiliki kemampuan teknis yang cukup dalam bidang audit, tetapi masyarakat tidak akan percaya kalau mereka tidak independen**.** Menurut Taylor (1991) dalam Risse (2005) tidak ada standar yang lebih penting dalam kode etik selain independensi, yang diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas.

Lebih lanjut Supriyono (2000) dalam Winda (2010) telah menyimpulkan beberapa pendapat para penulis mengenai pentingnya independensi yaitu:

1) Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi.
2) Independensi diperlukan akuntan untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan.
3) Independensi diperlukan untuk dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa independensi sangat penting bagi auditor, karena auditor merupakan profesi yang mengemban kepercayaan dari masyarakat. Auditor perlu mem-pertimbangkan tiga macam gangguan terhadap independensi (SPKN, 2007) dalam Winda (2010:22), yaitu:

(1) Gangguan pribadi

(a) Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.

(b) Memiliki kepentingan keuangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.

(c) Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

(d) Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.

(e) Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksa, seperti memberikan jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

(f) Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah.

(g) Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diperiksa.

(h) Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa.

(i) Adanya kecenderungan untuk memihak, karena kayakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.

(j) Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diperiksa.

(k) Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau program yang diperiksa.

(l) Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan.

(2) Gangguan ekstern

(a) Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.

(b) Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.

(c) Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan.

(d) Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa.

(e) Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan.

(f) Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.

(g) Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksa, simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau kriteria lainnya.

(h) Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksa.

(3) Gangguan organisasi

Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Dalam hal melakukan pemeriksaan, organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat

dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan diluar entitas tempat ia bekerja.

Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, maka pemeriksa tersebut harus menolak penugasan tersebut. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari kepemilikan dalam perusahaan yang diauditnya disamping itu auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya.

c. Klasifikasi Independensi Auditor

Menurut Arens (2008:125), independensi auditor dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1) Independensi dalam kenyataan (*independence in fact*), yaitu adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak di dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
2) Independensi dalam penampilan (*independence in appearence*), berarti adanya kesan masyarakat bahwa auditor bertindak independen sehingga auditor harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.

Setiap auditor harus mempunyai sikap independensi dalam kenyataan ataupun dalam penampilan, karena kedua aspek independensi tersebut mempunyai hubungan erat dan saling berkaitan satu sama lainnya.

3. Pengalaman Auditor

a. Pengertian Pengalaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami dalam kehidupan, dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya. Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Knoers & Haditono, 1999) dalam Shinta (2010).

Menurut Loehoer (2002) dalam Nataline (2007), pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah sesuatu proses pembelajaran yang membawa seseorang pada suatu pola tingkah laku ke tingkat yang lebih baik, yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan.

b. Pengalaman Auditor

Pengalaman auditor yang dimaksud disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan.

Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berfikir yang lebih terperinci, lengkap dan *sophisticated* dibandingkan seseorang yang belum berpengalaman (Taylor and Tood dalam Shinta, 2010:21). Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berfikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Eka dan Dwi, 2006)

Standar umum pertama SPKN yaitu "pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan". Dasar pemikiran standar umum pertama ini adalah auditor harus bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan audit dengan lingkup dan kompleksitas yang bervariasi. Untuk memperoleh mutu audit yang baik, auditor harus mempunyai keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sehingga mampu menghasilkan laporan audit yang akurat, berguna, dan kredibel (Rai, 2008:50). Selain itu, Guy, Alderman dan Winter (2002:25) menyatakan standar ini menempatkan tanggung jawab pada auditor untuk memenuhi persyaratan pelatihan serta keahlian melalui pendidikan dan pengalaman khusus dalam bidang audit.

Auditor diminta untuk melakukan audit dan memberikan pendapatnya atas laporan keuangan suatu perusahaan karena, melalui pendidikan, pelatihan dan

pengalamannya, ia menjadi orang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, serta memiliki kemampuan untuk menilai secara obyektif dan menggunakan pertimbangan tidak memihak terhadap informasi yang dicatat dalam pembukuan perusahaan atau informasi lain yang berhasil diungkapkan melalui auditnya (SA Seksi 210, paragraf 05).

Tubs (1992) dalam Risse (2005) mengatakan bahwa auditor yang berpengalaman akan memiliki keunggulan dalam: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan secara akurat, dan 3) mencari penyebab kesalahan.

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Simanjuntak, 2005 dalam Shinta, 2010). Dengan kata lain, auditor yang berpengalaman akan melakukan kontribusi lebih besar dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman.

c. Pentingnya Pengalaman Auditor

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan publik (Sri dan Ainun, 1999:154-155) dalam Rahmathul (2009:15).

Menurut Mulyadi (2002), jika seorang auditor memasuki karir sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Bahkan agar akuntan yang

baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dan profesinya. Pemerintah dalam SK Menteri Keuangan No.34/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik dibidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik. Guntur (2002) dalam Nataline (2007) menyebutkan bahwa pengalaman auditor (lebih dari 2 tahun) dapat menentukan profesionalisme, kinerja, komitmen terhadap organisasi, serta kualitas auditor melalui pengetahuan yang diperolehnya dari pengalaman melakukan audit.

Dengan demikian, pengalaman sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas audit. Cara memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda, demikian halnya dengan mengambil keputusan dalam tugasnya.

d. Indikator Pengalaman Auditor

Elemen-elemen variabel pengalaman ini (Tubs, 1992) dalam Eka dan Dwi (2006) adalah:

1) Kepekaan dalam mendeteksi adanya kekeliruan

   Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang peka dan cepat tanggap dalam mendeteksi adanya kekeliruan.

2) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit

   Semakin berpengalaman seorang auditor, maka akan dapat menyelesaikan tugas audit tepat waktu.

3) Kemampuan dalam menggolongkan kekeliruan

   Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu menggolongkan kekeliruan berdasarkan tujuan audit dan sistem akuntansi yang melandasinya.

4) Kesalahan dalam melakukan tugas audit

   Semakin berpengalaman seseorang, maka tingkat kesalahan dalam melaksanakan tugas audit dapat diminimalisasi.

Tubs (1992) dalam Eka dan Dwi (2006) jika seorang auditor berpengalaman maka:

1) Auditor menjadi sadar terhadap lebih banyak kekeliruan.
2) Auditor memiliki salah pengertian yang lebih sedikit tentang kekeliruan.
3) Auditor menjadi sadar mengenai kekeliruan yang tidak lazim.
4) Hal-hal yang terkait dengan penyebab kekeliruan departemen tempat terjadinya kekeliruan dan pelanggaran serta tujuan pengendalian internal menjadi relatif lebih menonjol.

4. Keandalan Bukti Audit

a. Pengertian Keandalan Bukti Audit

Menurut Arens, *et al* (2008), bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mulyadi (2002:74), bukti audit yaitu segala informasi yang mendukung angka-angka atau

informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Informasi ini sangat beragam kemampuannya dalam mempengaruhi auditor memutuskan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

Keputusan utama yang dihadapi auditor adalah menetukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen dalam laporan keuangan serta dalam keseluruhan laporan lainnya telah disajikan dengan wajar. Pertimbangan ini memegang peranan penting karena adanya hambatan biaya dalam menguji dan mengevaluasi semua bukti yang tersedia.

Dalam SPKN, pernyataan standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan ketiga menyebutkan bahwa : “bukti audit yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa (Rai, 2008:53)”. Dasar pemikiran standar ini adalah bahwa pelaksanaan audit pada hakekatnya merupakan pengumpulan dan pengujian atas bukti dan fakta yang ada dilapangan.

Standar tersebut tidak mengharuskan auditor untuk menjadikan bukti audit yang dikumpulkannya sebagai suatu dasar yang absolut bagi pendapat yang dinyatakan atas laporan keuangan auditan karena auditor tidak mungkin memperoleh keyakinan yang mutlak bahwa opini yang dipilihnya sudah benar karena beragamnya sifat bukti audit dan pertimbangan biaya untuk melaksanakan suatu audit. Namun dasar yang layak berkaitan dengan tingkat keyakinan secara

keseluruhan yang diperlukan oleh auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan (Mulyadi, 2002:78). Jadi dapat disimpulkan bahwa keandalan bukti audit adalah kemampuan bukti audit untuk meyakinkan auditor bahwa bahan bukti yang dikumpulkannya telah dapat memberi dasar yang layak dalam pengambilan keputusan atas audit yang dilakukannya.

Berbagai keputusan auditor dalam pengumpulan bukti dapat dipilah ke dalam empat sub keputusan (Arens *et al*, 2008:224) yaitu:

1) Berbagai prosedur audit.

   Prosedur audit adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsung proses audit. Dalam merancang berbagai prosedur audit, merupakan hal umum untuk menerjemahkannya kedalam berbagai istilah yang cukup spesifik agar dapat digunakan sebagai instruksi-instruksi selama pelaksanaan audit.

2) Ukuran sampel.

   Setelah memilih prosedur audit, auditor dapat mengubah ukuran sampel dari hanya satu sampel hingga semua item yang terdapat dalam populasi yang sedang diuji.

3) Item-item yang dipilih.

   Setelah menentukan ukuran sampel untuk prosedur audit yang dilakukan, haruslah ditentukan item-item mana dari populasi yang akan diuji.

4) Pemilihan waktu yang tepat.

   Audit atas laporan keuangan umumnya mencakup periode waktu tertentu seperti satu tahun, dan umumnya proses audit baru selesai dilaksanakan

setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya suatu periode waktu. Waktu pelaksanaan berbagai prosedur audit juga beragam mulai dari awal suatu periode akuntansi atau setelah periode akuntansi itu berakhir. Selain itu, keputusan untuk pemilihan waktu auditpun dipengaruhi oleh kapan audit tersebut harus diselesaikan agar sesuai dengan kebutuhan klien.

b. Persuasivitas Bukti Audit

Persuasivitas bukti audit menurut Arens, *et al* (2008:227) adalah suatu tingkat dimana auditor berhasil diyakinkan bahwa bukti-bukti audit dapat mendukung opini audit.

Pernyataan standar pelaksanaan ketiga mewajibkan auditor untuk mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. Disebabkan oleh bukti audit serta pertimbangan biaya untuk melaksanakan suatu audit, maka tidaklah mungkin bagi auditor untuk memperoleh keyakinan mutlak bahwa opini yang dipilihnya sudah benar. Bagaimanapun juga auditor harus mempunyai tingkat keyakinan yang tinggi bahwa pilihan opini auditnya benar. Dengan menggabungkan semua bukti yang diperoleh dari suatu proses audit, auditor akan mampu memutuskan kapan saatnya ia akan menerbitkan suatu laporan audit.

Dua penentu persuasivitas bukti audit menurut Arens, *et al* (2008:227) yaitu :

1) Kompetensi

Kompetensi bukti merujuk pada tingkat dimana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau diyakini kebenarannya dan hanya berkaitan dengan prosedur-prosedur audit yang terseleksi. Jika bukti audit dianggap memiliki kompetensi yang tinggi, maka bantuan bukti tersebut sangatlah besar untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Tingkat kompetensi tidak dapat ditingkatkan dengan cara memperbesar ukuran sampel atau mengambil item-item lainnya dari suatu populasi. Tingkat kompetensi hanya dapat diperbesar dengan memilih berbagai prosedur audit yang mengandung tingkat kualitas yang lebih tinggi atas satu atau lebih dari ketujuh karakteristik kompetensi bukti audit berikut:

(a) Relevansi

Bukti audit harus selaras dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dapat dipercaya. Relevan hanya dapat dipertimbangkan dalam tujuan audit spesifik. Bukti audit barangkali relevan untuk tujuan suatu audit, tetapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya.

(b) Independensi penyedia bukti audit

Bukti audit yang diperoleh dari sumber luar entitas akan lebih dapat dipercaya dari pada bukti audit yang diperoleh dari dalam entitas. Berbagai dokumen yang berasal dari luar organisasi klien akan dianggap lebih dapat dipercaya dari pada dokumen yang berasal dari dalam organisasi serta tidak pernah dikirim keluar organisasi.

(c) Efektivitas pengendali intern

Jika pengendalian intern berjalan secara efektif, maka bukti audit yang diperoleh akan lebih dapat dipercaya dari pada jika pengendalian intern itu lemah.

(d) Pemahaman langsung auditor

Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pengujian fisik, observasi, penghitungan dan inspeksi akan lebih kompeten dari pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung.

(e) Berbagai kualifikasi individu yang menyediakan informasi

Meskipun sumber informasi bersifat independen, bukti tidak akan dapat dipercaya kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memiliki kualifikasi untuk melakukan hal itu.

(f) Tingkat objektivitas

Bukti yang objektif akan lebih dapat dipercaya dari pada bukti yang membutuhkan pertimbangan tertentu untuk menetukan apakah bukti tersebut memang benar.

(g) Ketepatan waktu

Ketepatan waktu atas bukti audit dapat merujuk pada kapan bukti itu dikumpulkan atau pada kapan periode waktu yang tercover oleh proses audit itu. Umumnya bukti audit untuk mendukung akun-akun neraca akan lebih tepat dikumpulkan pada masa-masa yang dekat dengan tanggal neraca.

2) Kecukupan

Kuantitas bukti yang diperoleh akan menentukan kecukupannya. Pada umumnya kecukupan bukti diukur dengan ukuran sampel yang dipilih oleh auditor untuk dipakai sebagai dasar yang memadai dalam menyatakan pendapatnya.

Dalam menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus mempertimbangkan:

(a) Materialitas dan Resiko

Materialitas menunjukkan bahwa jika pos dalam laporan keuangan yang saldonya besar maka diperlukan jumlah bukti audit yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pos yang bersaldo tidak material. Sedangkan resiko menunjukkan bahwa jika pos dalam laporan keuangan memiliki kemungkinan tinggi untuk salah saji, maka jumlah bukti yang dikumpulkan oleh auditor umumnya lebih banyak dibandingkan dengan pos yang memiliki kemungkinan kecil untuk salah saji dalam laporan keuangan.

(b) Faktor Ekonomis

Untuk mendapatkan bukti audit yang cukup, auditor juga harus mempertimbangkan faktor ekonomis yaitu waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dikeluarkan. Jika dengan memeriksa jumlah bukti yang lebih sedikit dapat diperoleh keyakinan yang hampir sama dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan bukti, maka auditor memilih untuk memeriksa bukti audit yang lebih sedikit berdasarkan pertimbangan ekonomis.

(c) Ukuran dan Karakteristik Populasi

Menunjukkan bahwa semakin besar dan semakin heterogen populasi maka bukti audit yang harus dikumpulkan juga semakin banyak.

c. Jenis-jenis Bukti Audit

Menurut Arens, *et al* (2008:231) jenis-jenis bukti audit yang dapat dipilih auditor dalam memutuskan prosedur-prosedur audit yang akan digunakan antara lain :

1) Pemeriksaan fisik, merupakan inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva berwujud.
2) Konfirmasi, menggambarkan penerimaan tanggapan tertulis atau lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi akurasi informasi yang diajukan oleh auditor.
3) Dokumentasi, merupakan pengujian auditor atas dokumentasi dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan.
4) Prosedur analitis, menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menentukan apakah saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Prosedur analitis sangat penting sehingga harus dilakukan selama tahap perencanaan dan penyelesaian disetiap audit.
5) Wawancara dengan klien, merupakan upaya untuk mendapatkan informasi tertulis atau lisan dari klien dengan menjawab pertanyaan auditor oleh klien. Meskipun banyak bukti yang diperoleh dari klien melalui wawancara, bukti tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bukti yang

meyakinkan untuk memberikan kesimpulan, karena tidak didapat dari sumber yang independen dan barangkali cenderung mendukung pihak klien.

6) Rekalkulasi, melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Rekalkulasi atas berbagai perhitungan ini terdiri dari pengujian atas keakuratan aritmatis klien.
7) Pelaksanaan ulang, merupakan pengujian independen yang dilakukan oleh auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien, yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien.
8) Observasi, adalah penggunaan indera untuk menilai aktivitas klien. Selama menjalani penugasan dengan klien, auditor mempunyai banyak kesempatan untuk menggunakan inderanya (penglihatan, pendengaran, perasaan, dan penciuman) guna mengevaluasi berbagai item.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya mengenai independensi auditor adalah penelitian yang dilakukan oleh Nova (2008) yaitu menguji pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Penelitiannya dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Padang yang berjumlah 7 KAP dengan respondennya yaitu semua auditor yang terdapat pada KAP di Kota Padang. Penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor

berpengaruh terhadap kualitas audit di KAP Kota Padang, dimana hasil penemuannya di lapangan menunjukkan bahwa auditor menyadari akan pentingnya independensi, sehingga akan selalu mempertahankan independensinya untuk menciptakan kualitas audit yang baik.

Penelitian mengenai pengalaman auditor dan kelayakan bukti audit diteliti oleh Shinta (2010) yaitu pengaruh pengalaman auditor dan kelayakan bukti audit terhadap kualitas audit pemerintah. Shinta melakukan penelitiannya pada BPK-RI Perwakilan Jambi. Adapun respondennya yaitu semua auditor yang bekerja pada BPK-RI Perwakilan Jambi yang berjumlah 57 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan skala likert (5 alternatif jawaban). Uji yang dilakukan adalah uji statistik dengan tingkat signifikan 5%. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman auditor dan kelayakan bukti audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit pemerintah.

Selain Shinta, penelitian mengenai keandalan/kompetensi bukti audit juga diteliti oleh Miharni (2011) yaitu pengaruh independensi, skeptisme profesional dan bahan bukti yang kompeten terhadap kualitas audit pada KAP Kota Padang dan Pekanbaru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga variabel independennya berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

C. Kerangka Konseptual

Salah satu hal yang diatur oleh Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Audit adalah independensi auditor, kualitas audit yang dilakukan oleh auditor ditentukan oleh independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Independensi merupakan aspek yang unik dan vital dalam profesi akuntan publik. Meskipun seorang akuntan memiliki kemampuan teknis yang cukup dalam bidang audit tetapi masyarakat tidak akan percaya kalau mereka tidak independen. Dengan independensi yang dimiliki auditor, ia tidak akan dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak akan memihak dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat melaksanakan audit dengan baik dan memberikan pendapat sebagaimana yang seharusnya tanpa pengaruh pihak manapun. Dengan demikian auditor akan melaksanakan audit tanpa pengaruh dan dapat memberikan pendapat sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam audit sehingga dapat meningkatkan kredibilitas informasi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang akhirnya kulitas audit akan meningkat. Jadi semakin independen seorang auditor maka kualitas atas audit yang dilakukannya akan semakin baik.

Standar umum pertama menjelaskan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kecakapan profesional yang memadai (keahlian, pengalaman, dan pelatihan profesional) sebagai auditor. Pengalaman kerja yang dimiliki auditor dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering auditor melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat ia menyelesaikan pekerjaanya, sehingga semakin peka dan cepat tanggap

dalam mendeteksi adanya kekeliruan. Selain itu, dengan pengalaman yang banyak akan mengurangi risiko audit, sehingga dapat mencapai kualitas audit yang baik.

Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentuskan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pernyataan standar pelaksanaan ketiga mewajibkan auditor untuk mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan untuk menjadi dasar dan keyakinan yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa (auditor). Apabila bukti yang didapat telah andal, yakni memenuhi karakteristik cukup, kompeten, dan relevan dengan tujuan audit, didapat dari pihak yang independen, pengendalian intern kliennya baik, bukti audit diperoleh langsung oleh auditor, objektivitas, dan ketepatan waktu maka kualitas dari audit itu sendiri tidak diragukan lagi. Adapun kerangka konseptual yang melandasi pengembangan hipotesis penelitian dapat dilihat dari gambar berikut:

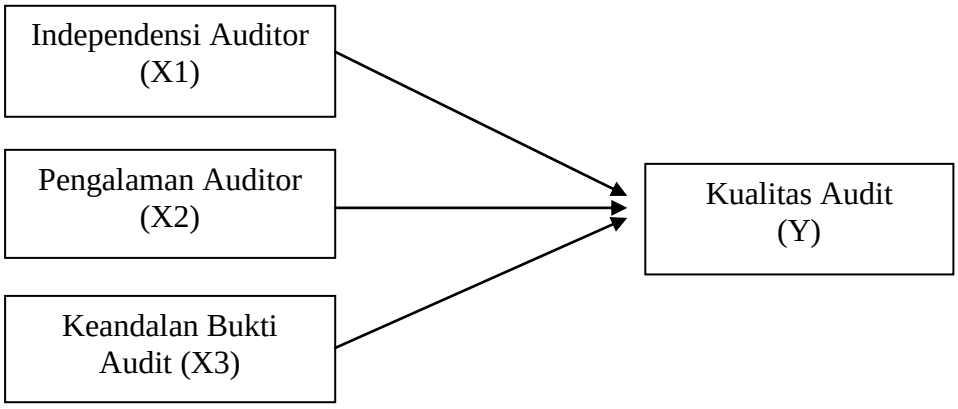

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H_1 : Independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

H_2 : Pengalaman auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

H_3 : Keandalan bukti audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari analisa pengaruh independensi auditor, pengalaman auditor dan kehandalan bukti audit terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut :

1. Independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.
2. Pengalaman auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.
3. Keandalan bukti audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah data yang dapat diolah karena tidak semua responden yang mengisi kuesioner yang dibagikan, sehingga hasilnya pun kurang dapat digeneralisasi untuk semua auditor.
2. Kuesioner yang peneliti sebarkan masih terdapat keterbatasan, karena pernyataan dalam kuesioner hanya menggunakan pernyataan positif saja. Sehingga menyebabkan responden diarahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.

C. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Auditor sebaiknya lebih meningkatkan lagi pemahamannya atas entitas yang diaudit serta lingkungannya dan lebih ditingkatkan lagi dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten.
2. Bagi auditor agar selalu menjaga dan meningkatkan independensinya agar kualitas audit jauh lebih baik.
3. Penelitian ini juga bisa dilanjutkan dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit untuk lebih baik lagi karena masih ada 25,2% pengaruh dari variabel lain, seperti kompetensi auditor, etika auditor, perencanaan dan supervisi, serta pemahaman atas pengendalian intern.